

STATISTIK

INDUSTRI MIKRO DAN KECIL

PROVINSI ACEH

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

STATISTIK

**INDUSTRI MIKRO DAN KECIL
PROVINSI ACEH**

2017

<https://aceh.bps.go.id>

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2017

Katalog BPS : 6104006.11
No. Publikasi : 11532.1802
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 50 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Industri Mikro Kecil (IMK) Provinsi Aceh 2017 merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2017 (VIMK17) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 dengan metode sampel, dalam publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 - 19 orang, yang meliputi antara lain; banyaknya usaha industri mikro dan kecil, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan usaha, serta pemasaran produksi Industri dan Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun konsumen data. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk berbagai penelitian atau studi khusus yang berkaitan dengan industri mikro dan kecil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah menyelesaikan publikasi ini.

Banda Aceh, November 2018
KEPALA BPS PROVINSI ACEH



WAHYUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PENJELASAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan	1
C. Lingkup dan Cakupan.....	2
D. Dokumen yang Digunakan	2
E. Metodologi	3
F. Organisasi Lapangan	4
G. Konsep dan Definisi	4
ULASAN RINGKAS	14
A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja.....	14
B. Balas Jasa Pekerja	16
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja	17
D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran	21
LAMPIRAN TABEL	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2017	14
Tabel 2 Persentase Usaha dan Tenaga Kerja menurut Status Pekerja Tahun 2017	15
Tabel 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2017	17
Tabel 4 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2017	20
Tabel 5 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2017	21
Tabel 6 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2017	24
Tabel 7 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2017	27
Tabel 8 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima dari Koperasi Setahun yang Lalu Tahun 2017	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2017 16
Gambar 2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2017 18
Gambar 3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2017 19
Gambar 4	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 20
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro Kecil menurut Sumber Modal Tahun 2017 22
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2017 23
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2017 24
Gambar 8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2017 25
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2017 26
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2017 27
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/ Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2017 29
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima pelayanan/Bantuan Tahun 2017 29
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran di Provinsi Aceh Tahun 2017 30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2017	32
Tabel 2 Persentase Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2017..	32
Tabel 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2017	33
Tabel 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2017	33
Tabel 5 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2017	34
Tabel 6 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2017	34
Tabel 7 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2017	35
Tabel 8 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2017	35
Tabel 9 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2017	36
Tabel 10 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2017	36
Tabel 11 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2017	37
Tabel 12 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2017	37
Tabel 13 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2017	38
Tabel 14 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2017	38
Tabel 15 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2017	39
Tabel 16 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalani Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2017	39

Tabel 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2017	40
Tabel 18	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2017	40
Tabel 19	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2017	41
Tabel 20	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2017	41

<https://aceh.bps.go.id>

Penjelasan Umum

<https://aceh.bps.go.id>

A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2017 (VIMK17) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK17 sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK17 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Aceh yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK17 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK17 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi indikator IMK seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Kendala dan pemasaran
- f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK17 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.798 blok sensus dan mencakup 90.231 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Untuk wilayah Aceh terpilih sebanyak 608 blok sensus yang mencakup 4.195 perusahaan/usaha mikro dan kecil untuk seluruh kabupaten/kota. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2017 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. **VIMK17-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK17-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK17-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK17-S2 (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. **VIMK17-RB2 (Rekap Blok Sensus)**, digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a) Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).
- b) Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2015. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK 2017 sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE2006. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi dilakukan pada level kabupaten/kota.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

Tahap pertama: memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara PPS (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya IMK hasil SE2006. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus terstratifikasi dari seluruh kabupaten/kota terpilih dalam satu provinsi.

Tahap kedua: mengambil seluruh industri kecil dan memilih sejumlah industri mikro dari hasil *listing* secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK17, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK17 adalah :

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS.
- b. Petugas Pemeriksa (PMS): Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatus BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi.

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK17.

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *makloon*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI

hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2009 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. **Produksi utama** yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa industri** terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

f. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

- 1) **Tidak tamat SD** : Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
- 2) **SD & sederajat** : Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.
- 3) **SLTP & sederajat** : Mereka yang tamat SMP, MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.
- 4) **SLTA & sederajat** : Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi

Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.

- 5) **DI/DII** : Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
- 6) **Sarjana Muda/ DIII** : Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih** : Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

g. Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

h. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar** : Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar** : Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang

biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja.**

3) Tenaga kerja produksi : Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

4) Tenaga kerja lainnya : Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

i. Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah): Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.

1) Upah/gaji : Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

2) Upah lembur : Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

3) Hadiah : Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.

4) Bonus : Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

5) Tunjangan : Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.

j. Biaya Umum : Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:

1) Bahan Baku : Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

2) Bahan Penolong : Bahan yang digunakan untuk membantu proses

produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.

- 3) **Bahan Bakar** : Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
- 4) **Pelumas**: Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
- 5) **Pemakaian Listrik**
Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
- 6) **Pemakaian Air**
Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 7) **Pemakaian Gas Kota**
Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 8) **Alat tulis dan keperluan kantor**: Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.
- 9) **Bunga atas pinjaman**: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2012, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 10) **Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi**: Seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.
- 11) **Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal**: Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 12) **Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/ konstruksi,**

dan barang modal lainnya : Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) Sewa tanah untuk usaha : Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) Pajak tak langsung : Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya : Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan : Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian : Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan : Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

i. Harta yang dimiliki

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d. Kendaraan
 - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

m. Sumber modal : Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) **Milik sendiri :** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.

2) **Pihak lain** : Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK17 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a. **Bank** : Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b. **Koperasi** : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c. **Lembaga Keuangan Bukan Bank** : Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d. **Modal Ventura** : Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e. **Keluarga/famili** : Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f. **Lainnya** : Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

n. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2017, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan**: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- 2) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.
- 3) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 4) **Bimbingan/penyuluhan pemasaran:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan:** Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil 2017 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

a. Industri Makanan	KBLI: 10
b. Industri Minuman	KBLI: 11
c. Industri Pengolahan Tembakau	KBLI: 12
d. Industri Tekstil	KBLI: 13
e. Industri Pakaian Jadi	KBLI: 14
f. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI: 15
g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya.	KBLI: 16
h. Industri Kertas dan barang dari Kertas	KBLI: 17
i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI: 18
j. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI: 20
k. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI: 21
l. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI: 22
m. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI: 23
n. Industri Logam Dasar	KBLI: 24
o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 25
p. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	KBLI: 28
q. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI: 30
r. Industri Furnitur	KBLI: 31
s. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI: 32

t. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan -
Peralatannya

KBLI: 33

<https://aceh.bps.go.id>

Ulasan Ringkas

<https://aceh.bps.go.id>

Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor industri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2017 sumbangan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Aceh memang belum memperlihatkan kontribusi yang besar, namun demikian Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor industri pengolahan yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan kegiatan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja

Dari hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2017 (VIMK2017) tercatat jumlah usaha IMK di Aceh sebanyak 99.277 usaha (Tabel 1). Umumnya kegiatan yang diusahakan adalah industri makanan, minuman, industri tekstil (kerajinan sulaman/bordir), industri pakaian jadi, industri kayu dan bahan dari kayu, industri anyaman dari rotan, bambu dan sebagainya. Secara nasional jumlah usaha IMK di Aceh hanya sebesar 2,22 persen dari jumlah usaha IMK nasional, dimana jumlah seluruh usaha IMK di Indonesia mencapai 4,46 juta usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 angka ini sedikit menurun, dimana persentase usaha industri untuk Aceh pada tahun sebelumnya sebesar 1,79 persen atau sebanyak 65.492 usaha dari jumlah IMK nasional yaitu 3,67 juta usaha.

Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2017

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja					Jumlah
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	50 538	45 756	2 634	162	187	99 277
%	50.91	46.09	2.65	0.16	0.19	100.00
Indonesia	1 809 771	2 296 126	243 405	73 714	41 672	4 464 688
%	40.54	51.43	5.45	1.65	0.93	100.00

Usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro (IM) sedangkan usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang dikategorikan sebagai Industri Kecil (IK). Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha industri mikro sangat mendominasi survei ini yaitu mencapai 97,00 persen dari jumlah total usaha industri sebanyak 96.294 usaha. Sedangkan selebihnya 3,00 persen merupakan usaha industri kecil. Kondisi yang sama juga terjadi secara nasional dimana persentase usaha industri mikro mencapai 91,96 persen, sedangkan usaha industri kecil 8,04 persen.

Sebagian besar tenaga kerja pada usaha Industri Mikro dan Kecil Tahun 2017 dilakukan oleh pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, persentase tenaga kerja tidak dibayar lebih besar dari tenaga kerja dibayar yaitu sebesar 74,68 persen atau sebanyak 135.391 orang, dan selebihnya 25,32 persen merupakan pekerja dibayar yaitu sejumlah 45.912 orang dari total tenaga kerja sebanyak 181.303 orang. Begitu juga halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK yang melibatkan pekerja dibayar persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja tidak dibayar. Dimana terdapat sebanyak 39,37 persen pekerja dibayar atau sejumlah 4,24 juta orang, sedangkan 60,63 persen adalah sebagai pemilik atau pekerja keluarga yang tidak dibayar.

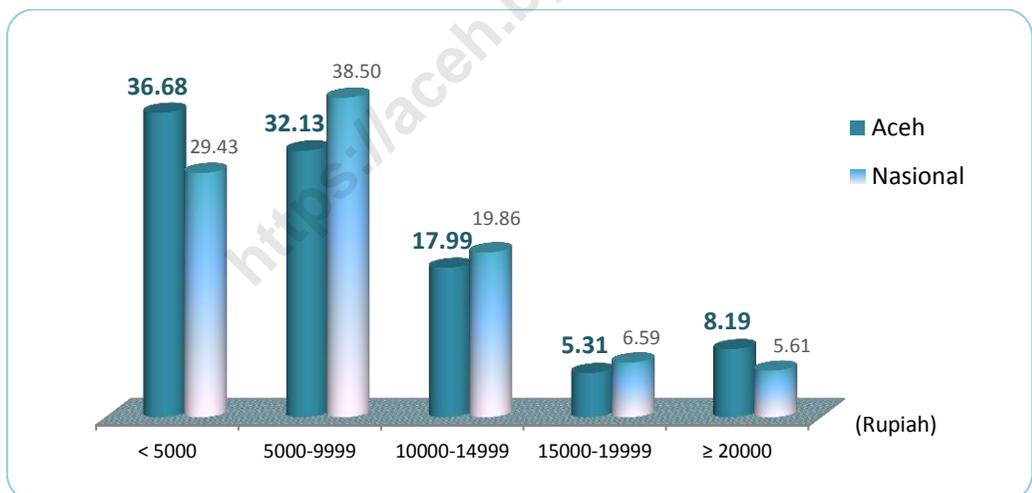
Tabel 2. Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2017

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99 277	45 912	135 391	181 303
%	2.22	25.32	74.68	100.00
Indonesia	4 464 688	4 243 824	6 534 772	10 778 596
%	100	39.37	60.63	100.00

B. Balas Jasa Pekerja

Secara nasional, penyerapan tenaga kerja IMK di Provinsi Aceh pada tahun 2017 adalah sebanyak 1,68 persen dengan rata-rata balas jasa pekerja 1,24 persen. Jika dilihat dari besarnya balas jasa pekerja memperlihatkan sebaran yang hampir sama antara usaha IMK di Aceh dan secara nasional. Untuk usaha IMK di Aceh persentase tertinggi adalah usaha dengan rata-rata upah pekerja per jam kurang dari lima ribu rupiah yang mencapai 36,68 persen. Ini artinya usaha dengan upah yang masih jauh dibawah rata-rata mendominasi di wilayah Aceh. Sedangkan persentase tertinggi untuk usaha IMK nasional pada nilai upah antara lima ribu hingga kurang dari sepuluh ribu rupiah per jam dengan persentase 38,50 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2017



Jika dilihat dari jumlah hari kerja yang mendominasi adalah usaha dengan jumlah hari kerja maksimum (21-31 hari) yaitu sebanyak 65,26 persen dengan rata-rata 7 jam kerja per hari. Sedangkan usaha IMK dengan jumlah hari kerja 1-10 hari hanya sebesar 10,09 persen saja dan sisanya 24,65 persen berada pada rentang 11-20 hari kerja dengan rata-rata jam kerja masing-masing adalah 6 jam per hari. Begitu halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK sebahagian besar memiliki jumlah hari kerja 21-31 hari atau sebesar 64,99 persen dengan rata-rata jam kerja adalah 7 jam per hari.

Tabel 3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2017

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan					
	1-10		11-20		21-31	
	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10.09	6	24.65	6	65.26	7
Indonesia	11.99	6	23.02	6	64.99	7

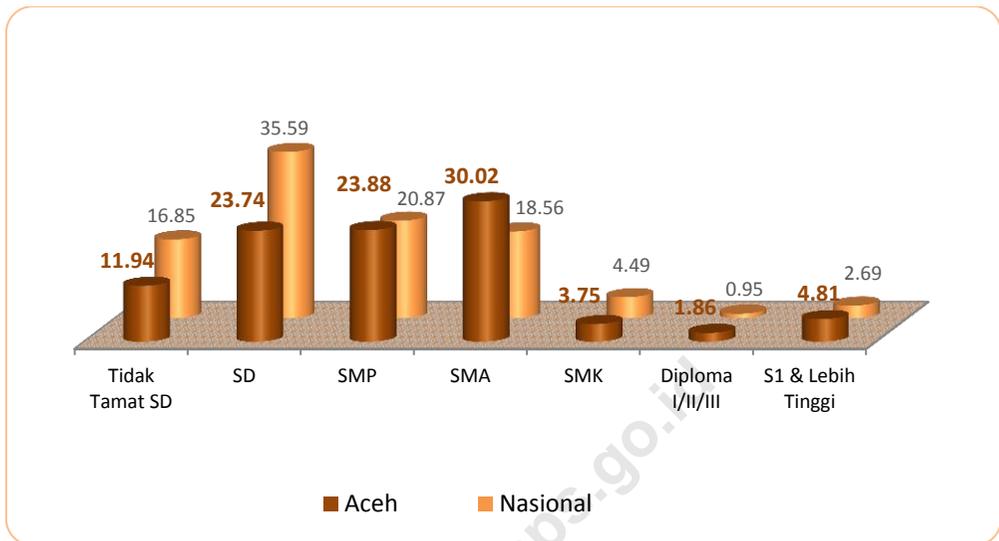
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja

Secara umum berdasarkan hasil survei tahun 2017 jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pengusaha, persentase terbesar adalah usaha IMK dengan pendidikan tamatan SMA dan tamatan SMP. Sebanyak 30,02 persen usaha industri yang pengusahanya menamatkan pendidikan SMA dan yang tamat SMP sebesar 23,88 persen. Sedangkan yang tamat SD persentasenya sebesar 23,74 persen. Untuk kondisi nasional usaha IMK dengan pendidikan yang ditamatkan pengusaha didominasi oleh tingkat SD dan SMP dengan persentase masing-masing 35,59 persen dan 20,87 persen. Sedangkan pengusaha dengan pendidikan tamatan SMA persentasenya sebesar 18,56 persen.

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan pengusaha pada tingkat Sarjana (S1) atau lebih tinggi hanya sebesar 4,81 persen untuk Aceh. Angka ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 1,99 persen. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan angka nasional persentasenya tidak jauh berbeda yaitu 2,69 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa usaha IMK umumnya dijalankan oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan SMA ke awah. Sedangkan usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi yang ditamatkan pengusaha hanya sedikit jumlahnya. Hal ini juga memberi sedikit gambaran bahwa pengusaha IMK minim keahlian, dan dapat dikatakan keahliannya dalam berusaha hanya secara turun temurun atau otodidak maupun berasal dari pengalaman.

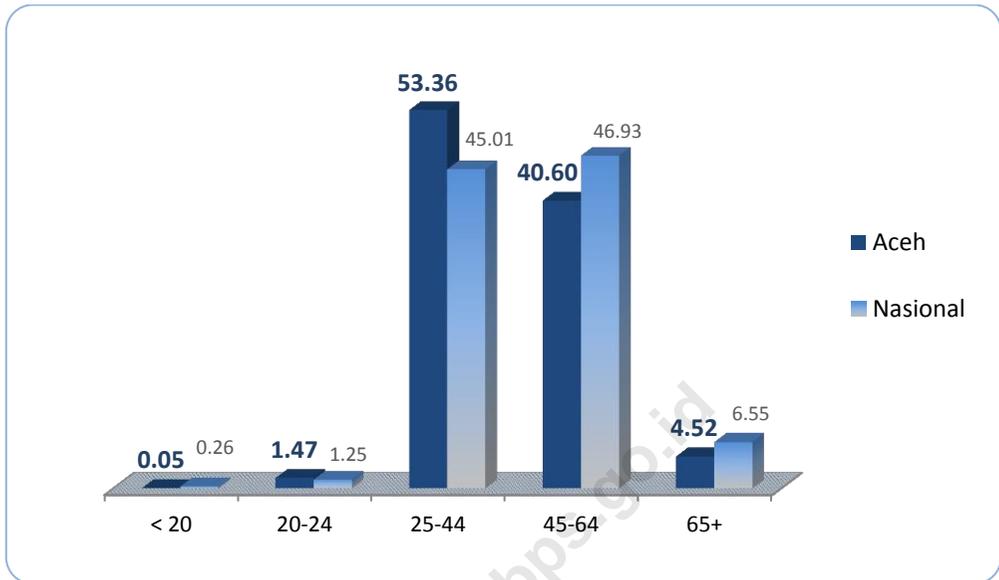
Gambar 2.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2017



Usaha IMK juga didominasi oleh pengusaha dengan kelompok umur produktif yaitu 25-64 tahun. Ini merupakan suatu kewajaran bila pada jenjang usia tersebut mengharuskan seseorang mempunyai penghasilan karena sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Umur 64 tahun dianggap umur maksimal dapat melakukan usaha, karena terkendala banyak hal diantaranya faktor kesehatan, kemampuan dalam mengingat dan sebagainya. Namun demikian masih ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada umur 65 tahun ke atas, meskipun persentasenya cukup kecil.

Berdasarkan kelompok umur pengusaha, sebagian besar usaha mikro kecil pengusahanya berada pada kelompok umur 25-44 tahun yang mencapai 53,36 persen. Kemudian disusul dengan kelompok umur pengusaha 45-64 tahun sebanyak 40,60 persen. Persentase terkecil adalah usaha dengan kelompok umur di bawah 20 tahun yaitu 0,05 persen. Adapun secara nasional persentase usaha pada kelompok umur pengusaha 45-64 tahun lebih mendominasi yaitu sebesar 46,93 persen. Sedangkan kelompok umur dibawah 20 tahun persentasenya hanya 0,26 persen.

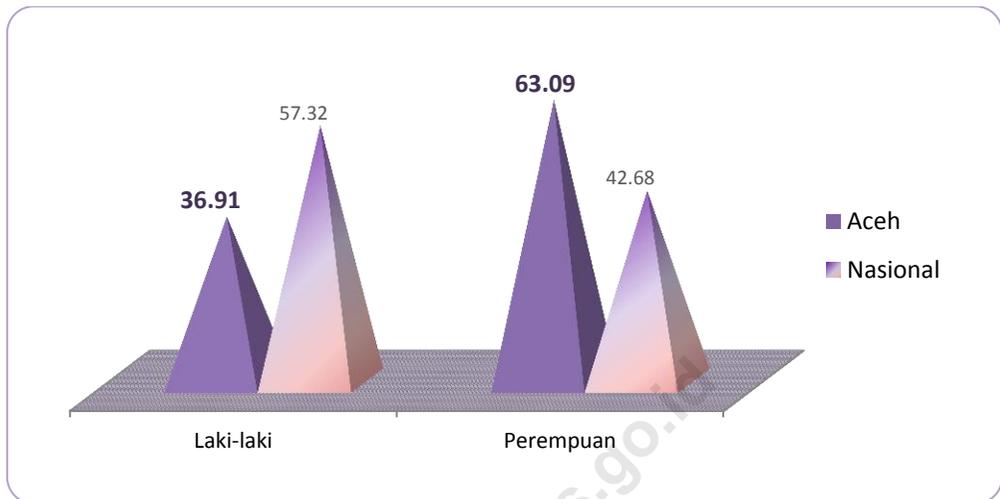
Gambar 3.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha
Tahun 2017



Peran *gender* dalam usaha IMK sangatlah berpengaruh. Hal ini terlihat dari persentase tenaga kerja pada usaha IMK Aceh yang lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Persentase tenaga kerja perempuan pada tahun 2017 mencapai 63,09 persen atau sebanyak 114.392 orang, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang memiliki jumlah persentase 64,50 persen. Sedangkan tenaga kerja laki-laki meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 36,91 persen atau sejumlah 66.911 orang dari total 181.303 tenaga kerja.

Dibandingkan dengan nasional, komposisi tenaganya berkebalikan dengan Provinsi Aceh dimana persentase laki-laki sedikit lebih besar mencapai 57,32 persen, dan tenaga kerja perempuannya sebesar 42,68 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil bukan hanya menjadi kegiatan usaha utama bagi laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan baik untuk menopang ekonomi rumah tangga ataupun usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan.

Gambar 4.
Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil
menurut Jenis Kelamin Tahun 2017



Pada usaha Industri Mikro dan Kecil hampir seluruh tenaga kerja merupakan pekerja produksi, dengan persentase di atas 95 persen. Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan utama adalah kegiatan yang langsung berhubungan dalam proses produksi, seperti pekerja yang secara langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, maupun mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pekerja pendukung perusahaan seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.

Tabel 4. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2017

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33.68	3.22	61.61	1.49	95.29	4.71	100.00
Indonesia	53.38	3.94	39.98	2.70	93.36	6.64	100.00

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil adalah pekerja tidak dibayar. Terdapat perbedaan komposisi pekerja menurut jenis kelamin terhadap statusnya sebagai pekerja dibayar dan tidak dibayar. Untuk pekerja dibayar, jumlah pekerja laki-laki lebih besar dari pada pekerja perempuan dengan persentase 14,87 persen pekerja laki-laki dan 10,45 persen untuk pekerja perempuan. Sedangkan pekerja tidak dibayar persentase perempuan lebih besar yaitu 52,64 persen dan pekerja laki-laki 22,04 persen.

Adapun secara nasional persentase tenaga kerja laki-laki sebagai pekerja dibayar adalah 28,08 persen, dan pekerja tidak dibayar 29,24 persen. Sedangkan persentase tenaga kerja perempuan sebagai pekerja dibayar lebih kecil yaitu 11,29 persen dan pekerja tidak dibayar sebesar 31,39 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mendominasi pada usaha IMK khususnya untuk pekerja dengan status dibayar baik di Aceh maupun skala nasional, sedangkan tenaga kerja perempuan lebih cenderung berstatus tidak dibayar atau pekerja keluarga.

Tabel 5. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan status Pekerja Tahun 2017

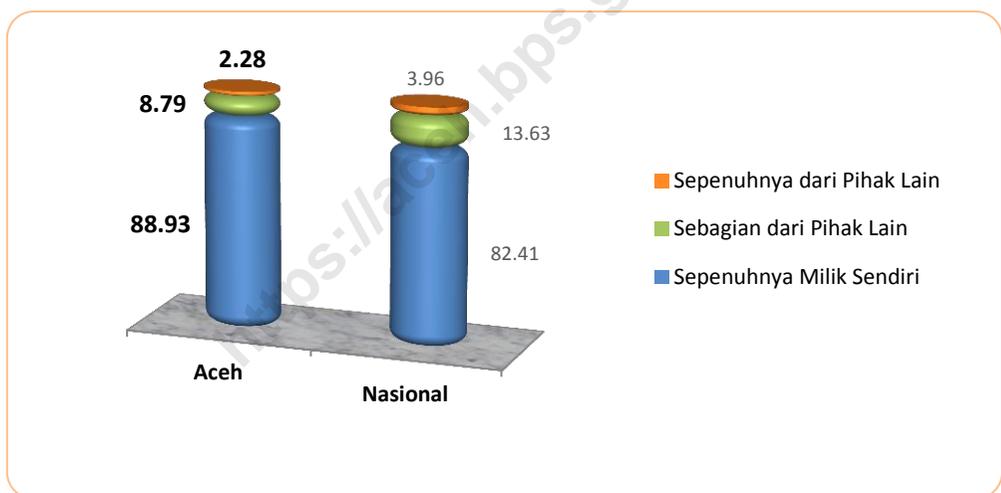
Provinsi	Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Laki-laki	14.87	22.04	36.91
	Perempuan	10.45	52.64	63.09
	Jumlah	25.32	74.68	100.00
Nasional	Laki-laki	28.08	29.24	57.32
	Perempuan	11.29	31.39	42.68
	Jumlah	39.37	60.63	100.00

D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran

Hal penting dalam melakukan kegiatan usaha adalah bagaimana pelaku usaha menyikapi masalah kendala usaha dan menciptakan prospek peluang usaha ke depan. Beberapa variabel yang dikumpulkan dalam survei IMK 2017 antara lain; sumber permodalan, kesulitan utama dalam menjalankan usaha, keikutsertaan dalam koperasi, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil produksi.

Ditinjau dari sumber modal (Gambar 5), terindikasi bahwa usaha IMK sebagian besar sumber modalnya adalah milik sendiri dengan persentase 88,93 persen dan sebagian dari pihak lain sebesar 8,79 persen. Cakupan secara nasional juga memperlihatkan angka cukup tinggi pada persentase usaha dengan sumber modal milik sendiri yaitu 82,41 persen dan 13,63 persen untuk sumber modal sebagian dari pihak lain. Sedangkan yang sepenuhnya berasal dari pihak lain persentasenya cukup kecil, hanya 2,28 persen untuk Aceh dan sebesar 3,96 persen untuk persentase nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah dan lembaga terkait lainnya belum dirasakan maksimal oleh para pengusaha industri mikro dan kecil.

Gambar 5.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal
Tahun 2017



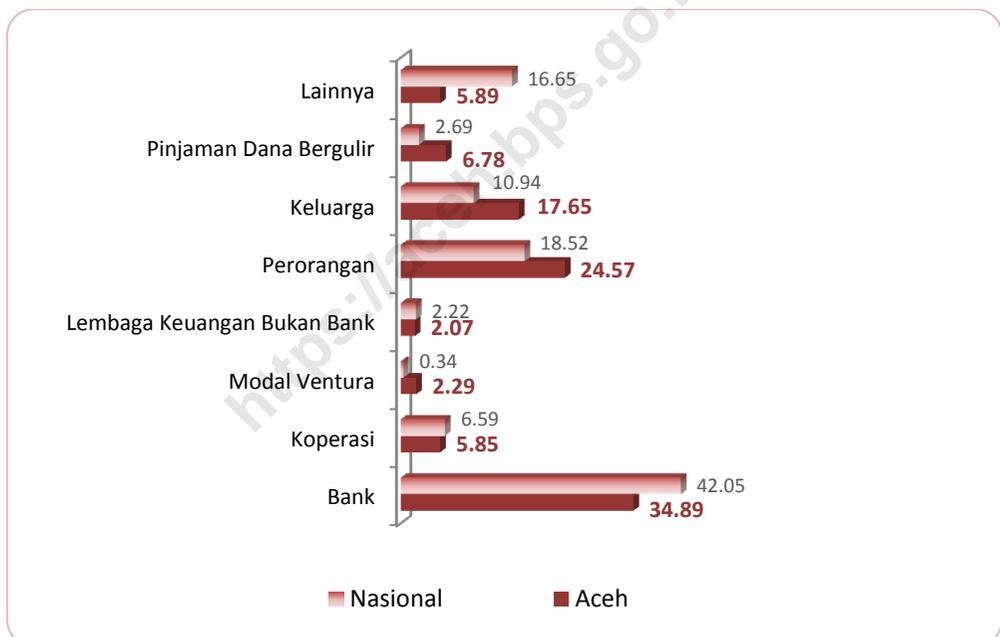
Meskipun banyak usaha IMK yang menggunakan sumber modal milik sendiri, akan tetapi sebagian pengusaha juga tetap melakukan pinjaman modal demi kelancaran dan meningkatkan usahanya. Ada beberapa sumber yang dijadikan tempat peminjaman utama oleh pengusaha untuk permodalannya, antara lain; bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, serta ada yang meminjam kepada perorangan dan keluarga.

Pengusaha IMK di Aceh yang memanfaatkan pinjaman hanyalah sekitar 11,07 persen saja, sedangkan sisanya 88,93 persen tidak memanfaatkan pinjaman. Berdasarkan asal pinjaman utama, yang melakukan pinjaman bank menjadi urutan

teratas dengan persentase 34,89 persen. Hal ini berbeda dari kondisi pada tahun sebelumnya dimana yang melakukan pinjaman kepada keluarga lebih banyak diminati. Kemudian asal pinjaman yang persentasenya juga cukup tinggi adalah pinjaman perorangan dan pinjaman keluarga dengan persentase masing-masing 24,57 persen dan 17,65 persen.

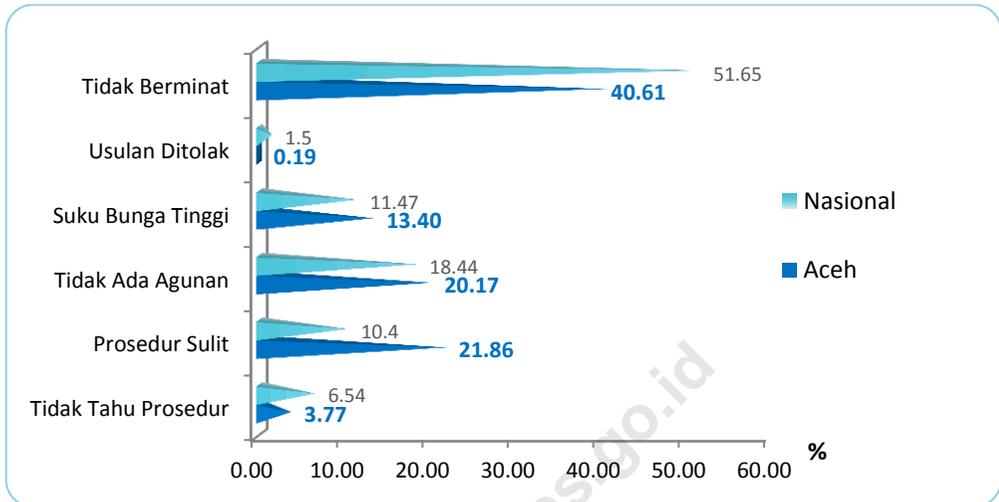
Jika kita amati dari persentase di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa saat ini para pengusaha lebih cenderung untuk memilih pinjaman bank dikarenakan sudah banyak bank yang menawarkan suku bunga rendah khususnya untuk usaha mikro kecil seperti kredit usaha rakyat dan sebagainya.

Gambar 6.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama
Tahun 2017



Dari gambar 6 terlihat pula bahwa pengusaha IMK secara nasional lebih banyak memanfaatkan pinjaman bank dengan besaran 42,05 persen. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pinjaman bank tetap menjadi pilihan utama bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan modal pinjaman untuk usahanya.

Gambar 7.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2017



Sebagian besar usaha IMK memiliki alasan tidak meminjam dari bank dikarenakan tidak berminat dengan persentase 40,61 persen. Selanjutnya 21,86 persen beralasan prosedur sulit. Begitu halnya angka nasional juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi untuk usaha IMK yang tidak berminat meminjam dari bank yaitu sebanyak 51,65 persen, dan sebesar 18,44 persen memiliki alasan tidak ada agunan.

Dalam survei ini juga ditanyakan kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 75,10 persen usaha mikro dan kecil di Aceh pengusahanya mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan pada skala nasional sebanyak 65,67 persen yang mengalami kesulitan.

Tabel 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2017

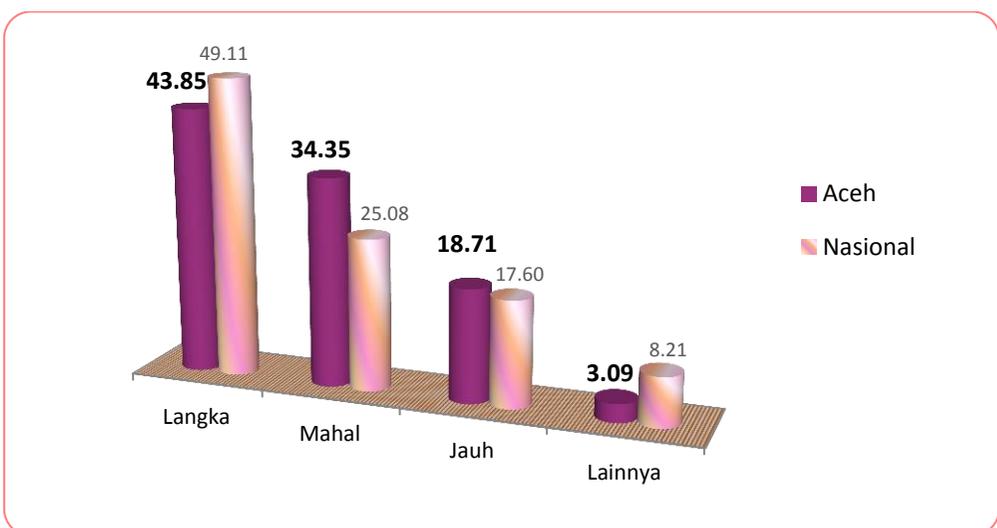
Jenis Kesulitan Utama	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Bahan Baku	11.03	17.10
Pemasaran	43.42	28.60
Modal	12.15	21.56
BBM/Energi	9.81	9.76
Transportasi	5.64	2.90

Keterampilan	6.21	6.00
Upah Buruh	7.70	4.06
Lainnya	4.04	10.03
Mengalami Kesulitan	75.10	65.67
Tidak Mengalami Kesulitan	24.90	34.33
Jumlah	100.00	100.00

Kesulitan utama yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha IMK adalah masalah pemasaran hasil produksi. Sebanyak 43,42 persen usaha IMK di Aceh yang pengusahanya mengalami kesulitan pemasaran. Selanjutnya yang mendominasi adalah kesulitan modal usaha dengan persentase sebesar 12,15 persen, dan kesulitan bahan baku dengan persentase 11,03 persen. Sedangkan kesulitan lain seperti masalah BBM/energi, transportasi, keterampilan, upah buruh dan lainnya, persentasenya cukup kecil yaitu kurang dari sepuluh persen. Namun demikian sejumlah 24,90 persen usaha IMK di Aceh tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

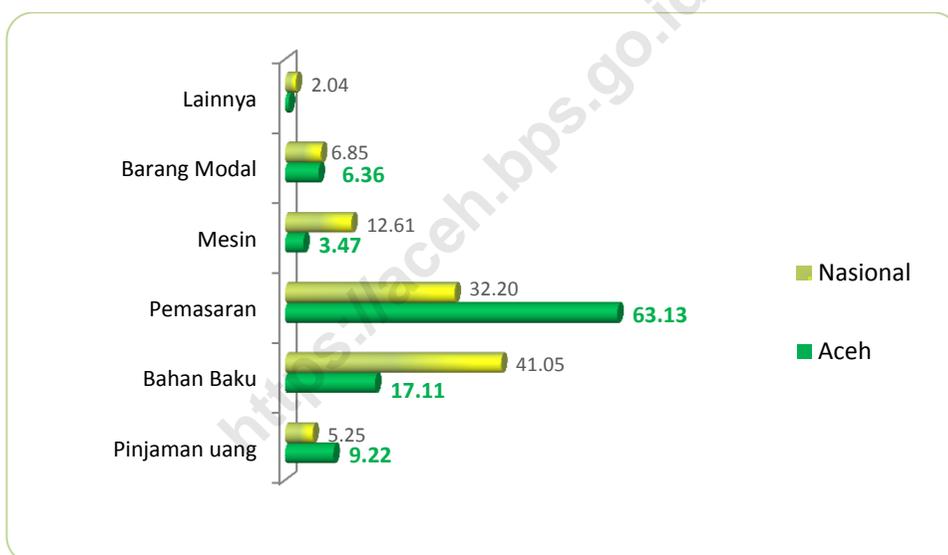
Ditinjau dari skala nasional, masalah pemasaran juga menjadi kendala utama dalam kegiatan industri dengan persentase 28,60 persen. Kemudian disusul dengan kesulitan modal sebesar 21,56 persen dan bahan baku 17,10 persen.

Gambar 8.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama
Bahan Baku Tahun 2017



Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa sekitar 11,03 persen usaha IMK di Aceh mengalami kesulitan utama bahan baku, dan untuk nasional sebesar 17,10 persen. Kesulitan bahan baku ini, terutama dikarenakan oleh kelangkaan bahan baku dengan persentase sebesar 43,85 persen, sedangkan secara nasional persentasenya sebesar 49,11 persen. Kesulitan bahan baku berikutnya dikarenakan mahal (34,35 persen) dan jauh (18,71 persen). Dapat diduga sebagian besar pengusaha yang menyatakan kesulitan bahan baku adalah usaha IMK yang memproduksi kerajinan kayu atau bahan-bahan dari kayu, juga usaha industri yang memproduksi kerajinan anyaman dari bambu dan rotan maupun rumbia.

Gambar 9.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2017



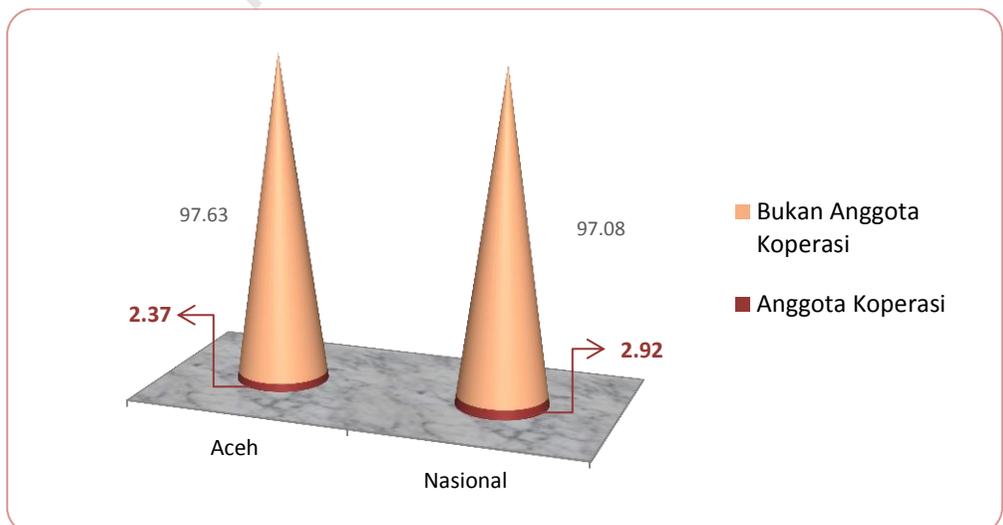
Untuk mengembangkan perusahaan diperlukan kemitraan dengan usaha lain. Kemitraan dapat bekerjasama dalam permodalan, penyediaan bahan baku atau pemasaran. Tahun 2017 persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain cenderung kecil yaitu hanya 9,98 persen. Namun demikian beberapa usaha yang menjalin kemitraan terutama dalam hal pemasaran menduduki peringkat teratas yakni sebesar 63,13 persen, dan pengadaan bahan baku sebesar 17,11 persen. Sedangkan dalam hal pinjaman uang persentasenya lebih sedikit yaitu 9,22 persen, kemudian barang modal maupun mesin persentasenya masing-masing 6,36 persen dan 3,47 persen.

Sedangkan kondisi nasional persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain persentasenya yaitu 11,06 persen. Dimana persentase terbesar dalam hal pengadaan bahan baku mencapai 41,05 persen. Kemudian menyusul kemitraan dalam hal pemasaran sebanyak 32,20 persen.

Tabel 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2017

Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
BUMN/BUMD	5.54	1.40
Swasta	22.52	37.04
Perbankan	3.19	2.10
LSM	0.32	1.78
Lainnya	68.42	57.68
Menjalinkan Kemitraan	9.98	11.06
Tidak Menjalinkan Kemitraan	90.02	88.94
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 10.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2017



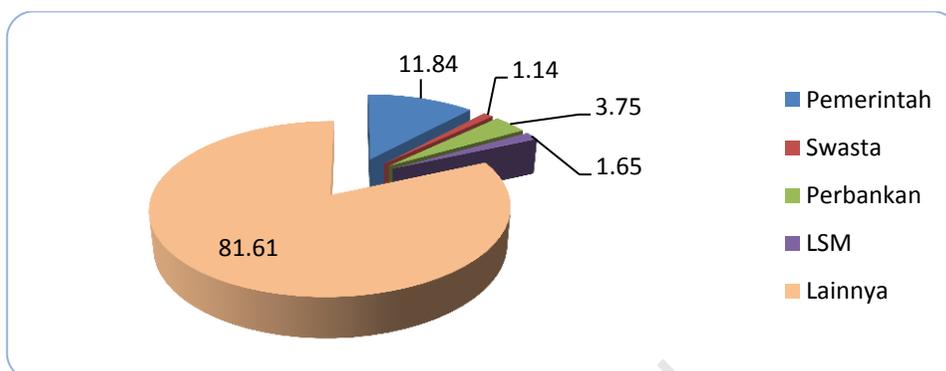
Hal yang sedikit memprihatinkan bahwa para pengusaha IMK hampir tidak tersentuh oleh koperasi. Padahal koperasi merupakan suatu wadah yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal dan lainnya. Karena bagaimanapun koperasi dapat diandalkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, akan tetapi belum mampu merangkul para pengusaha IMK untuk memanfaatkan jasa koperasi dalam menjalankan usahanya. Hanya sekitar 2,37 persen usaha di Aceh yang tergabung sebagai anggota koperasi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase ini sedikit meningkat, dimana angka pada tahun sebelumnya hanya 1,99 persen. Sedangkan secara nasional persentasenya sekitar 2,92 persen.

Di samping itu, persentase usaha IMK yang menerima pelayanan/bantuan dari koperasi hanya sedikit saja yaitu sekitar 4,15 persen. Begitupun angka nasional juga masih rendah yaitu sekitar 4,39 persen. Sedangkan lebih dari 95 persen usaha tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan. Adapun usaha mikro kecil yang menerima pelayanan/bantuan dari badan maupun lembaga baik pemerintah, koperasi, swasta, LSM dan lainnya dapat berupa bantuan uang, barang modal, pengadaan bahan baku, pelayanan pemasaran, mesin dan lainnya.

Tabel 8. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima dari Koperasi Setahun yang Lalu Tahun 2017

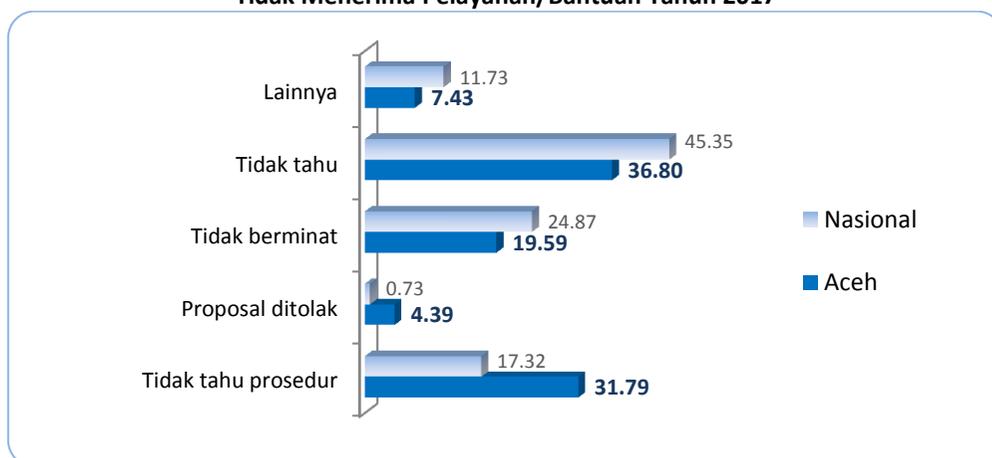
Pelayanan yang Diterima	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Uang	49.12	37.48
Bahan Baku	9.98	9.37
Pemasaran	1.62	7.25
Mesin	4.70	4.48
Barang Modal	18.69	8.30
Lainnya	15.89	33.12
Menerima Pelayanan	4.15	4.39
Tidak Menerima pelayanan	95.85	95.61
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 11.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan
menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2017



Banyak program bantuan yang telah digulirkan pemerintah untuk meningkatkan usaha industri mikro dan kecil di daerah. Namun bantuan tersebut hanya sedikit sekali yang dirasakan oleh para pengusaha. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya karena tidak tahu prosedur, proposal ditolak, tidak berminat, bahkan ada yang tidak tahu. Sebanyak 36,80 persen dari usaha IMK Aceh yang pengusahanya mengaku tidak tahu akan pelayanan/bantuan baik dari pemerintah, koperasi maupun lembaga lainnya. Selain itu relatif kecilnya usaha IMK yang menerima bantuan, dapat juga disebabkan dana yang dialokasikan pada bantuan pengembangan usaha industri mikro kecil masih terbatas. Sehingga ketidaktahuan pengusaha akan prosedur pelayanan serta proposal yang ditolak juga menjadi salah satu hambatan tidak diperolehnya bantuan.

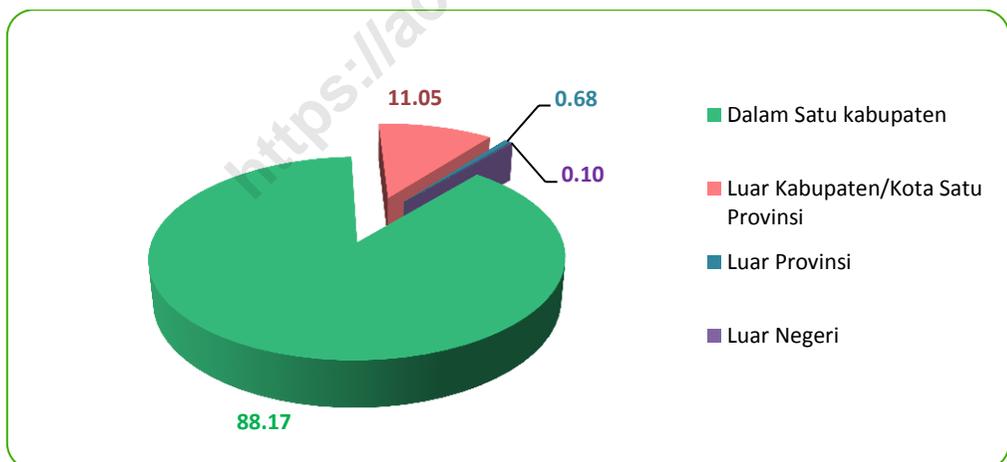
Gambar 12.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama
Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2017



Salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan suatu usaha industri adalah menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Pemilihan lokasi pemasaran yang kurang tepat akan menghambat kelancaran usaha industri itu sendiri. Dengan jalinan kemitraan yang cukup terbatas, maka ruang lingkup pemasaran hasil produksi cenderung sempit. Untuk wilayah Aceh, lokasi pemasaran yang menjadi sasaran terbanyak adalah dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 88,17 persen, kemudian luar kabupaten/kota satu provinsi sebanyak 11,05 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri dengan persentase masing-masing 0,68 persen dan 0,10 persen.

Begitu pula halnya dengan kondisi nasional, pemasaran hasil produksi lebih banyak dipasarkan dalam satu kabupaten/kota dengan persentase 80,13 persen. Sebanyak 15,58 persen dipasarkan di luar kabupaten/kota satu provinsi dan luar provinsi hanya 4,05 persen saja. Sedangkan untuk pemasaran diluar negeri rata-rata hanya dibawah satu persen dari seluruh total produksi.

Gambar 13.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran
di Provinsi Aceh Tahun 2017



Lampiran Tabel

<https://aceh.bps.go.id>

Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2017
Table 1 *Number of Micro and Small Scale Establishment by Group of Workers in Aceh Province 2017*

Provinsi Province	Kelompok Tenaga Kerja Group of Workers					Jumlah Total
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	50 538	45 756	2 634	162	186	99 277
Indonesia	1 809 771	2 296 126	243 405	73 714	41 672	4 464 688

Tabel 2 Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2017
Table 2 *Percentage of Establishment, Workers, Revenue, Expenditure, and Compensation of Workers of Micro and Small Scale Establishment in Aceh Province 2017*

Provinsi Province	Banyak- nya Usaha Number of Establish- ment	Tenaga Kerja (%) Workers			Pendapat- an Revenue	Pengeluar- an Expenditure	Balas Jasa Pekerja Compensati- on of Workers
		Dibayar Paid	Tidak Dibayar Unpaid	Jumla- h Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	99 277	25.32	74.68	100.00	7 454 916 094	3 738 396 564	819 515 212
Indonesia	4 464 688	39.37	60.63	100.00	602 462 437 410	327 767 240 081	66 163 506 071

Tabel 3 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 3 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment and Average of Working Hour a Day by Working Day a Month in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan / Working Day a Month						Jumlah / Total	
	1- 10		11- 20		21- 31			
	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	10.09	6	24.65	6	65.26	7	100.00	6
Indonesia	11.99	6	23.02	6	64.99	7	100.00	7

Tabel 4 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 4 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment by Level of Educational Attainment of Entrepreneurs in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Level of Educational of Entrepreneurs							Jumlah Total
	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD Elementary School	SLTP Junior High School	SLTA Senior High School	Diploma I/II Diploma I/II	Sarjana Muda/ Diploma III Diploma III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi University Degree	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	11.94	23.74	23.89	30.02	3.75	1.86	4.81	100.00
Indonesia	16.85	35.59	20.87	18.56	4.49	0.96	2.69	100.00

Tabel 5 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 5 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment by Age Group of Entrepreneurs in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Kelompok Umur Pengusaha Age Group of Entrepreneurs					Jumlah Total
	< 20	20 - 24	25 - 44	45 - 64	> 64	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0.05	1.47	53.36	40.60	4.52	100.00
Indonesia	0.26	1.25	45.01	46.93	6.55	100.00

Tabel 6 **Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 6 **Percentage of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Sex and Kind of Workers in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Jumlah / Total		
	Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker		
	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	33.68	3.22	36.91	61.61	1.49	63.09	95.29	4.71	100.00
Indonesia	53.38	3.94	57.32	39.98	2.70	42.68	93.36	6.64	100.00

Tabel 7 **Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 7 **Percentage of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Workers Status and Sex in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Pekerja Dibayar / Paid Worker			Pekerja Tidak Dibayar / Unpaid Worker			Jumlah / Total		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	14.87	10.45	25.32	22.04	52.64	74.68	36.91	63.09	100.00
Indonesia	28.08	11.29	39.37	29.24	31.39	60.63	57.32	42.68	100.00

Tabel 8 **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 8 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Compensation of Paid Worker per Hour in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar Number of Establishment with Paid Worker	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Jam dalam Kelompok Rupiah (%) Compensation of Worker per Month in Group Thousand Rupiahs				
			< 5000	5000-9999	10000-14999	15000-19999	1.000-4.999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
Aceh	99 277	21 082	36.38	32.13	17.99	5.31	8.19
Indonesia	4 464 688	1 367 997	29.43	38.50	19.86	6.59	5.61

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table **9** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Revenue Value on a Year in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah) Revenue Value on a Year (Millions Rupiahs)									Jumlah Total
	< 5	5 - 9	10-24	25-49	50-99	100-199	200-249	300-449	500-999	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Aceh	8.01	13.02	25.93	22.07	14.78	8.44	2.93	2.56	2.26	100.00
Indonesia	10.91	11.39	20.23	16.94	15.22	11.46	4.70	4.27	4.87	100.00

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table **10** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Source of Capital in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Sumber Modal Source of Capital			Jumlah Total
	Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebahagian dari Pihak Lain Partially from Others	Sepenuhnya dari Pihak Lain Fully from Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	88.93	8.79	2.28	100.00
Indonesia	82.42	13.63	3.96	100.00

Tabel 11 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 11 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Source of Main Loan in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Sumber Modal Source of Capital		Sumber Modal Utama The Main Source of Capital							
		Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebagian atau Sepenuhnya Pihak Lain Others	Bank Bank	Koperasi Cooperative	Modal Ventura Ventura Capital	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institutions	Perorang- an Individual	Keluarga Family	Pinjaman Dana Bergulir Revolving Fund Loans	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Aceh	99 277	88.93	11.07	34.89	5.85	2.29	2.07	24.57	17.65	6.78	5.89
Indonesia	4 464 688	82.42	17.58	42.05	6.59	0.34	2.22	18.52	10.94	2.69	16.65

Tabel 12 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 12 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Main Reason for Not Having Bank Loan in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha yang Memanfaat- kan Pnjaman Number of Establishment Having Loans	Meminjam dari Bank Having Bank Loans	Tidak Meminjam dari Bank Not Having Bank Loans	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Main Reason for Not Having Bank Loan					
				Tidak Tahu Prosedur Not Knowing Procedur	Prosedur Sulit Difficulty in Procedur	Tidak Ada Agunan Not Having Collateral	Suku Bunga Tinggi Interest Rate	Usulan Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	10 989	36.76	63.24	3.77	21.86	20.18	13.40	0.19	40.61
Indonesia	785 096	43.10	56.90	6.54	10.40	18.44	11.47	1.50	51.65

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table **13** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulties in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties	Jenis Kesulitan Types of Difficulties							
				Bahan Baku Raw Materials	Pemasar an Marketi ng	Modal Capital	BBM/ Energi Fuel/ Energy	Transpo rtasi Transpo rtation	Keteram pilan Skill	Upah Buruh Wage	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	10 989	24.90	75.10	11.03	43.42	12.15	9.81	5.64	6.21	7.70	4.04
Indonesia	785 096	34.33	65.67	17.10	28.60	21.56	9.76	2.90	6.00	4.06	10.03

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table **14** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulty of Raw Material in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Types of Main Difficulty of Raw Material			
			Selain Bahan Baku Except Raw Material	Bahan Baku Raw Material	Langka Scarcity	Mahal Expensive	Jauh Distant	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	10 989	24.90	83.88	16.12	43.85	34.35	18.71	3.09
Indonesia	785 096	34.33	77.02	22.98	49.11	25.08	17.60	8.21

Tabel 15 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 15 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Membership of Cooperative and Kind Services Received in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Bukan Anggota Koperasi Non Member of Cooperative	Anggota Koperasi Member of Cooperative	Tidak Menerima Pelayanan Not Received Service	Menerima Pelayanan Received Service	Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Types of Services Received a Year Ago					
						Uang Money	Bahan Baku Raw Materials	Pemasaran Marketing	Mesin Machinery	Barang Modal Capital Asset	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99 277	96 928	2 349	95.85	4.15	49.12	9.98	1.62	4.70	18.69	15.89
Indonesia	4 464 688	4 334 244	130 444	95.61	4.39	37.48	9.38	7.25	4.48	8.30	33.12

Tabel 16 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 16 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Organizer of Business Partnership in Aceh Province 2017**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalin Kemitraan Not Having Partnership	Menjalin Kemitraan Having Partnership	Badan/lembaga yang Menjalin Kemitraan Organizer of Business Partnership				
				BUMN/BUMD Government	Swasta Private	Perbankan Bank	LSM NGO	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	99 277	90.02	9.98	5.54	22.52	3.19	0.32	68.42
Indonesia	4 464 688	88.94	11.06	1.40	37.04	2.10	1.78	57.68

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 17 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments with Workers Receiving Business Advisory by Kind of Business Advisory in Aceh Province 2017**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Menjalinkan Kemitraan <i>Not Having Partnership</i>	Menjalinkan Kemitraan <i>Having Partnership</i>	Jenis Kemitraan yang Diterima <i>Kind of Partnership Received</i>					
				Uang <i>Money</i>	Bahan Baku <i>Raw Materials</i>	Pemasaran <i>Marketing</i>	Mesin <i>Machine</i>	Barang Modal <i>Capital Goods</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Aceh	99 277	90.02	9.98	9.22	17.11	63.13	3.47	6.36	0.71
Indonesia	4 464 688	88.94	11.06	5.25	41.05	32.20	12.61	6.85	2.04

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2017**

Table 18 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments Receiving Business Advisory by Organizer of Business Advisory in Aceh Province 2017**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan <i>Organizer of Business Advisory</i>				
		Pemerintah <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Perbankan <i>Bank</i>	LSM <i>NGO</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	99 277	11.84	1.14	3.75	1.65	81.61
Indonesia	4 464 688	5.62	2.51	3.97	0.51	87.39

Tabel 19 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 19 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receiving Assistanship in Aceh Province 2017**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan <i>Reason for Not Receiving Assistanship</i>				
		Tidak Tahu Prosedur <i>Not Knowing the Procedur</i>	Proposal Ditolak <i>Proposal Rejected</i>	Tidak Berminat <i>Not Interested</i>	Tidak Tahu <i>Not Knowing</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	99 277	31.79	4.39	19.59	36.80	7.43
Indonesia	4 464 688	17.32	0.73	24.87	45.35	11.73

Tabel 20 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2017**
Table 20 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Location of Marketing and Export in Aceh Province 2017**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Lokasi Pemasaran <i>Marketing Area</i>				Pemasaran ke Luar Negeri <i>Export</i>			
		Dalam Satu Kabupaten/ Kota <i>In The District</i>	Luar kabupaten/ Kota Satu Provinsi <i>Outside The District</i>	Luar Provinsi <i>Outside The Province</i>	Luar Negeri <i>Foreign</i>	1 - 24 %	25%- 49%	50% - 79 %	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Aceh	99 277	88.16	11.05	0.68	0.10	58.41	2.65	-	38.94
Indonesia	4 464 688	80.13	15.58	4.05	0.24	35.70	13.31	14.48	36.52

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp : (065) 23005

Fax : (0651) 33632

Email : bps1100@bps.go.id

Homepage : <http://www.aceh.bps.go.id>